



Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2015

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu "***Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat tahun 2016***" dan Misi Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. Misi ini terfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi dan etos profesional aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi yang diemban SKPD.
2. Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati berbagai unsur masyarakat.
3. Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan

spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.

5. Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan pada visi dan misi diatas maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2011-2016 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut diatas.

Berdasarkan Tupoksi SKPD maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan misi Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015, disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kota Provinsi Sulawesi Barat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*, disisi yang lain, penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga dimaksudkan sebagai aplikasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi

cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat
2. Bidang Bina Gizi dan KIA
3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
4. Bidang Bina P2KL
5. Bidang Pelayanan Farmasi dan Jaminan Kesehatan

Sekretaris dan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat yaitu Intalasi Farmasi dan Poliklinik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi barat.

Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan,

bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
4. Penyelenggaran pengkoordinasian dan pembinaan UPTD

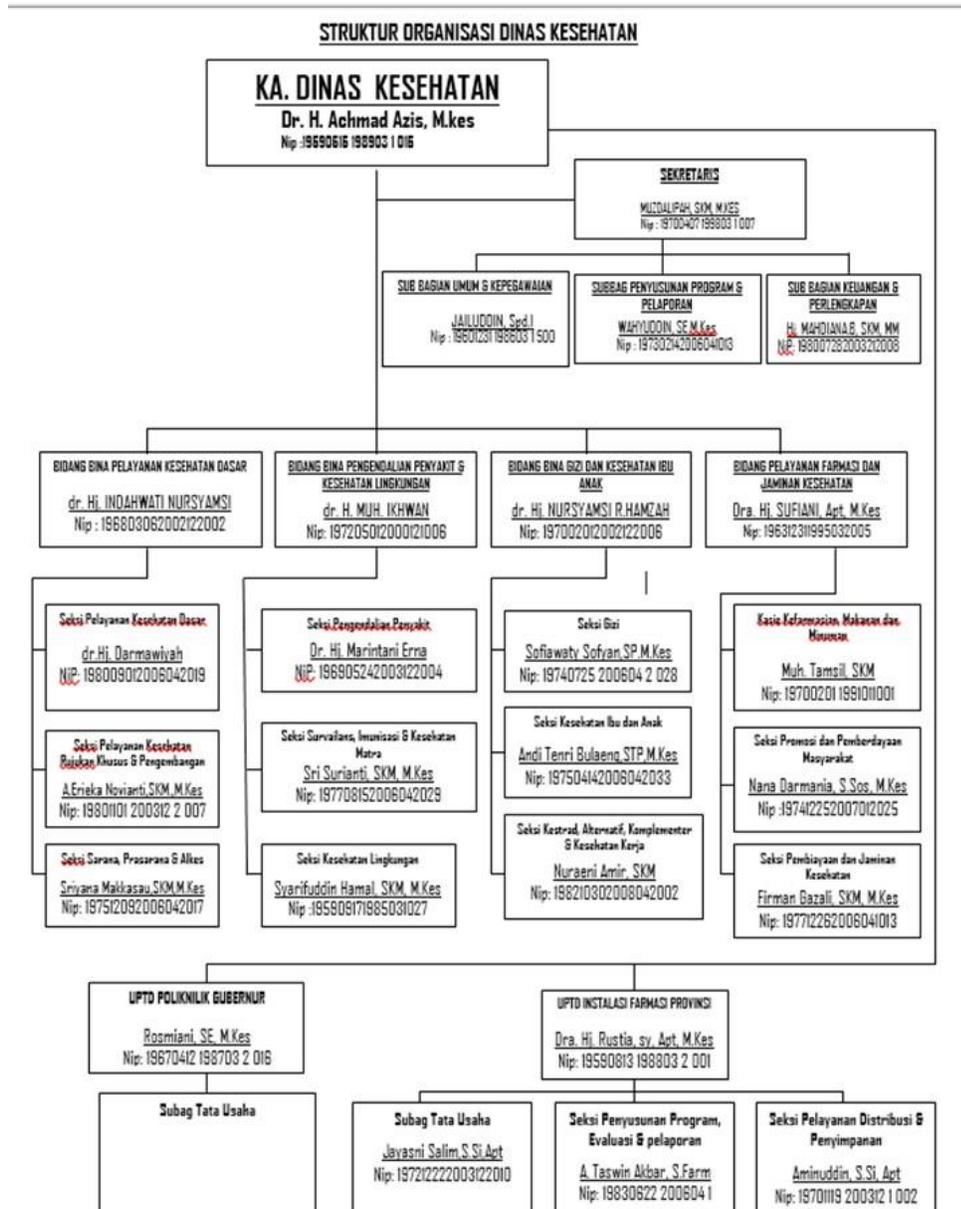
D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kepala Dinas kesehatan dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi Sub bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian penyusunan program dan pelaporan, dan sub bagian keuangan dan perlengkapan.
2. Bidang Bina gizi dan Kesehatan Ibu Anak membawahi Seksi gizi dan Seksi kesehatan ibu anak, dan Seksi kestrad, alternatif, komplementer dan kesehatan kerja.
3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar membawahi Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Seksi Pelayanan Kesehatan, Rujukan khusus dan Pengembangan, Seksii Sarana, Prasarana, B. Alkes
4. Bidang Bina Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan lingkungan membawahi Seksii Pengendalian Penyakit, Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra, dan Seksii Kesehatan Lingkungan.
5. Bidang Pelayanan Farmasi dan Jaminan Kesehatan membawahi Seksi Kefarmasian makanan dan minuman, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksii Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :

- a. UPTD Instalasi Farmasi Provinsi, membawahi Subag Tata Usaha, Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan Seksi Pelayanan, Distribusi dan Penyimpanan.
- b. UPTD Poliklinik Gubernur, membawahi Subag Tata Usaha.



BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2015

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2012 – 2016 dan telah selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2012 – 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2013.

Dalam tahun 2015, Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan bidang kesehatan.

A. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk mewujudkan 3 misi : meningkatkan Akses, kualitas Pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup.

Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat memiliki visi yaitu

"Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan Mandiri pada tahun 2016"

Untuk mendukung Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi :

1. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
2. Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
3. Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mempercepat terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mandiri pada tahun 2016 maka dijabarkan dalam beberapa tujuan :

Misi 1 : Menurunkan Angka kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016; Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 11,6 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 9,93/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016; Menurunkan Angka Kematian Balita dari 12,1 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016; Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016; Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

Misi 2 : Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya;

Misi 3 : Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.

Misi 4 : Meningkatnya kualitas manajemen dan perencanaan bidang kesehatan; Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan; Tersusunnya data dan informasi kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu

B. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

Tujuan	Sasaran
Tujuan 1 Menurunkan Angka kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka Kematian Ibu menurun hingga 50% pada tahun 2016
Tujuan 2 Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 11,6 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 9,93/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Bayi menurun hingga 20% pada tahun 2016
Tujuan 3 Menurunkan Angka Kematian Balita dari 12,1 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Balita menurun hingga 27% pada tahun 2016
Tujuan 4 Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016	Prevalensi gizi buruk menurun hingga 25% pada tahun 2016
Tujuan 5 Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat	Perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga 80 % pada tahun 2016 Persentase Desa Siaga Aktif 70% pada tahun 2016
Tujuan 6 Terselenggaranya Standarisasi dan	Persentase sekolah dasar 35% yang mempromosikan kesehatan pada tahun 2016

<p>peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan</p>	<p>Persentase Puskesmas Rawat inap mampu poned menjadi 52% pada tahun 2016</p> <p>Persentase Rumah Sakit Provinsi / Kab yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit</p> <p>Persentase RS Provinsi/Kab terakreditasi</p>
<p>Tujuan 7 Mencegah,menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dantidak menular serta masalah kesehatan lainnya.</p>	<p>Menurunkan Angka Penemuan kasus malaria menjadi 1,5 per 1000 penduduk pada tahun 2016</p> <p>Meningkatkan Persentase kasus TB baru (BTA) positif yang disembuhkan menjadi 75% pada tahun 2016</p> <p>Persentase desa UCI menjadi 100% pada tahun 2016</p>
<p>Tujuan 8 Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.</p>	<p>Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%.</p>
<p>Tujuan 9 Meningkatnya kualitas manajemen dan perencanaan bidang kesehatan</p>	<p>100% dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar.</p> <p>100% Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin</p>
<p>Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan</p>	<p>Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin</p>
<p>Tersusunnya data dan informasi kesehatan yang akurat, akuntabel,lengkap dan tepat waktu</p>	<p>100% Kabupaten dan provinsi menyusun Profil Kesehatan dan memiliki Sistem Informasi Kesehatan</p>

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan kesehatan dalam mempercepat tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan pemeriksaan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
2. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas ditingkat dasar maupun rujukan terutama bagi bayi
3. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan balita di sarana pelayanan kesehatan
4. Peningkatan cakupan kunjungan balita ke Sarana Pelayanan Kesehatan
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan Perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
6. Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
7. Fasilitasi Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
8. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit
9. Peningkatan upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit.
10. Meningkatkan peran lembaga pemerintah, media, non pemerintah (NGO) dalam kegiatan mengurangi faktor risiko.
11. Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik.
12. Peningkatan manajemen kesehatan
13. Registrasi tenaga kesehatan
14. Pengumpulan data Kesehatan dan pengembangan jaringan Sistem Informasi Kesehatan berbasis teknologi

Arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016. Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
2. Pemenuhan sarana dan tenaga kesehatan
3. P4K
4. Imunisasi
5. Peningkatan pelayanan persalinan normal dan komplikasi dasar dengan peran PONEK dan PONEK
6. Peningkatan kunjungan balita ke sarana kesehatan
7. Pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini melalui penimbangan berat badan secara rutin
8. Pemberian makanan pendamping ASI
9. Mendorong kerja sama dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wawasan kesehatan
10. Pencegahan dan pengendalian penyakit diselenggarakan dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang sinergis, komprehensif dan bermutu
11. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas
12. pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan
13. Mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan.
14. Penyusunan Profil Kesehatan berbasis data terpilah dan pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program
Menurunnya Angka Kematian Ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4)
Menurunnya Angka Kematian Bayi	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
	Persentase RS yang terakreditasi
	Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS
	Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONES
Menurunnya Angka Kematian Balita	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)
Prevalensi Gizi buruk menurun	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)
	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada tahun 2016	Persentase RT ber –PHBS
70% Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2016	Persentase Desa Siaga Aktif
Angka penemuan kasus malaria berkurang	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk

Kasus TB Paru (BTA +) ditemukan berkurang	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan
Persentase Desa UCI mencapai 100 persen pada tahun 2016	Persentase desa UCI meningkat
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat tiap tahunnya	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin
Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Meningkatnya manajemen kesehatan
Tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berisin	Teregistrasinya tenaga kesehatan
Kabupaten dan Provinsi meyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan	100 % Kab memilki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin

E. Program Dan Kegiatan Tahun 2015

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis kantor
- Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
- Penyediaan jasa Publikasi Media Cetak
- Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan RKA/DPA-SKPD
- Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
- Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD
- Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
- Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggungjawaban Belanja
- Penyusunan laporan Pertanggung Jawaban Bulanan Bendahara
- Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Monitoring Farmasi Komunitas dan Klinik di Rumah Sakit
- Pertemuan Penggunaan Antibiotika yang Rasional

- Penyediaan Data Stok Obat di Instalasi Farmasi
- Penyediaan Operasional di IFP
- Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat
- Distribusi Obat
- Pelayanan Kefarmasian
- Harmonisasi Pengelolaan Obat dalam Rangka Pelaksanaan Jaminan
- Pembekalan Teknik Tenaga Kesehatan (Apoteker) di RS tentang Visite
- Advokasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di PKM
- Pembekalan Tenaga Kesehatan tentang Bahan Tambahan Pangan Makanan
- Pemantauan Indikator Penggunaan Obat Rasional (ISPA Non Pneumonia, Diare Non Spesifik dan Myalgia di PKM)

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Monev program pembinaan Kesehatan tradisional, alternatif dan Komplementer
- Lomba TOGA tk. Prov. Sulbar
- Pelatihan Pos UKK bagi petugas Puskesmas dan kader kabupaten
- Pelatihan asuhan mandiri bagi petugas kesehatan

8. Program Pengawasan Obat dan Makanan

- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- Pembinaan Jajanan Anak Sekolah

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

- Pembinaan Desa Siaga Aktif
- Pertemuan Koordinasi Pokjanel Desa Kelurahan Siaga Aktif
- Pertemuan Koordinasi dengan LP LS Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
- Monitoring dan Evaluasi Program Gizi
- Workshop Percepatan Perbaikan Gizi
- Pelatihan PMBA
- Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pemetaan Masalah Gizi di Daerah Bangun Mandar
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Air Susu Ibu
- Pertemuan Komitmen Peningkatan IMD dan ASI Eksklusif
- TOT Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
- Pelatihan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
- Pelayanan Gizi dan KIA bagi Ibu Hamil KEK di Kab.Mamuju Utara

11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Pemicuan Jamban Sehat
- Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis untuk Sanitarian Rumah Sakit
- Pelatihan Teknis Pemeriksaan Kualitas Air Bagi Sanitarian

- Pelatihan Fasilitator STBM
- Monitoring dan Evaluasi Higiene Sanitasi Pangan
- Sosialisasi Kampanye CTPS
- Penyediaan Data STBM dan HSP Program Sanitasi dan Lingkungan Sehat

12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

- Fasilitasi Cool Room
- Sweeping Program Imunisasi
- Distribusi Vaksin
- Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi
- Bimbingan Teknis Surveians
- Pembinaan Kesehatan Matra
- Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Matra
- Bimbingan Teknis PD3I
- Pelatihan Teknis dan Manajemen Pos TB Desa
- Pencetakan Format Pencatatan dan Pelaporan TB
- Pertemuan Koordinasi Petugas Surveilans KLB Se-Provinsi Sulawesi Barat
- Pertemuan Kesiapsiagaan Masalah Krisis Kesehatan Se-Provinsi Sulawesi Barat
- Pembuatan Media Informasi dan Publikasi Surveilans KLB
- Logistik Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi
- Pelatihan Pemberian Imunisasi TT Wanita Usia Subur 5 Dosis

- Peningkatan Pengetahuan Petugas Pengelola Program DBD Arbovirosis
- Pelacakan Kasus Filariasis
- Monitoring Evaluasi Pasca Pengobatan Massal (POMPFil) Program Filariasis
- Pelacakan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies
- Workshop Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok
- Pertemuan Evaluasi Program ISPA & Pneumonia
- Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Pengelola Program Pengendalian Vektor
- Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis
- Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Kader Pemantau dan Pengendali Jentik
- Bimbingan Teknis Kader Posmaldes
- Pelacakan Kasus Malaria
- Pengadaan Abate
- Pemeriksaan Kontak Kusta
- Pelatihan TIM Layanan Komfrehesif Berkesinambungan HIV AIDS dan IMS

13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Manajemen Fasilitas Kesehatan
- Penyusunan Profil Rumah Sakit
- Pelatihan Teknis Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Medis
- Visitasi Penetapan dan Peningkatan Kelas Rumah Sakit
- Workshop Penyusunan Dokumen tata kelola keuangan RS

- Peningkatan kapasitas Teknis bagi petugas UTD
- Peningkatan kapasitas teknis tim PONED
- Konsultasi Pusat Program pelayanan Kesehatan Dasar
- Monev Terpadu Kesiapan Pelayanan Kesehatan
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD Poliklinik
- Workshop penyusunan rencana strategik bisnis BLUD PKM
- Workshop penyusunan SPM dalam rangka BLUD di PKM
- Pelatihan petugas laboratorium PKM tingkat Lanjut
- Peningkatan kapasitas teknis dokter gigi PKM era JKN
- Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di kabupaten
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di DTPK
- Training of Trainers emergency Nursing
- Pengembangan institusi wajib lapor NAPZA di sarana kesehatan
- Rapat koordinasi pelaksanaan PERKESMAS
- Peningkatan kapasitas bidandalam penerapan asuhan kebidanan dengan pendekatan sayang ibu dan bayi
- Peningkatan kapasitas petugas call center dalam penanggulangan
- Pemutakhiran data dalam rangka penyusunan profil kesehatan rujukan
- Penyusunan SOP dan pola pembinaan Pelayanan Obstetri Neonatal
- Bimbingan dan survey akreditasi Rumah sakit

- Peningkatan kapasitas tim PONEK Rumah Sakit
- Pengembangan SIM RS open source dan e-medical record di Rumah Sakit
- Optimalisasi pelaksanaan clinical pathway di Rumah Sakit
- Benchmarking pelayanan kesehatan rujukan

14. Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

- Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak
- Pertemuan Audit Maternal Perinatal
- Sosialisasi dan advokasi pencegahan komplikasi dengan P4K bagi Masyarakat
- Workshop Peningkatan Kesehatan Reproduksi
- Peningkatan Kemampuan Petugas dalam APN
- Monev Program Kesehatan Ibu dan Anak
- Advokasi pelaksanaan P4K, kemitraan bidan dan dukun dan RTK
- Peningkatan kapasitas petugas dalam SDIDTK
- Peningkatan kapasitas petugas dalam kelas ibu hamil dan balita
- Peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang MTBS
- Peningkatan kemampuan petugas dalam penjangkaran anak sekolah
- Orientasi teknis integrasi PAUD bagi bidan
- Peningkatan kapasitas petugas dalam pencatatan dan pelaporan program
- Peningkatan kemampuan petugas dalam Antenatal Care (ANC) standar
- Sosialisasi penggunaan buku KIA

- Sosialisasi dan advokasi pencegahan komplikasi dengan P4K
- Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Asfiksia dan BBLR

15. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

- Analisis manfaat pembiayaan BOK Terhadap capaian MDGs Tahun 2015
- Pemantauan pelaksanaan JKN dalam upaya pencapaian Universal Coverage
- Pertemuan evaluasi program jaminan kesehatan tk. Provinsi

16. Program Kebijakan dan Management Pembangunan Kesehatan

- Lokakarya Pembangunan Aset Daerah Terkait Dengan Bidang Kesehatan
- Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
- Penyusunan Buku Laporan tahunan MDG
- Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesehatan Se Provinsi
- Rapat Evaluasi Program MDG'S Bidang Kesehatan
- Pengembangan Program Kesehatan Bangun Mandar
- Pertemuan Program BangunMandar Sehat

17. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Penilaian Bagi Tenaga Teladan di Puskesmas
- Pembinaan dan pengawasan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis
- Sosialisasi dan Fasilitasi Aplikasi Pemetaan SDM Kesehatan
- Pelatihan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan

- Pembekalan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
- Workshop penyusunan SOP administrasi bidang kesehatan

18. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

- Workshop Penyusunan Capaian SPM Kesehatan
- Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Pengembangan SIK
- Pencetakan Buku Informasi Kesehatan

F. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Sasaran umum pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN.

Sasaran indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 terdapat penambahan indikator kinerja disesuaikan dengan Rencana strategis tahun 2012 – 2016 yang di susun dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2012 – 2016

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015

Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program	2015
Menurunnya Angka Kematian Ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	67
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K ₄)	74,09
Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan	Persentase RS yang terakreditasi	60

Dasar dan rujukan		
	Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	75
	Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	48
Menurunnya Angka Kematian Bayi	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	85
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	90
Menurunnya Angka Kematian Balita	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	83,76
	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada tahun 2016	Persentase RT ber -PHBS	75
70% Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2016	Persentase Desa Siaga Aktif	68
35% Sekolah Dasar mempromosikan Kesehatan pada tahun 2016	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan	30
Angka penemuan kasus malaria berkurang	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk	1,5
Kasus TB Paru (BTA +) ditemukan berkurang	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	75
Persentase Desa UCI mencapai 100 persen pada tahun 2016	Persentase desa UCI meningkat	100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat tiap tahunnya	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	75
Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	100
Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin	100

Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	100
Kabupaten DBK mendapatkan fasilitasi penanggulangan DBK	Persentase kabupaten dengan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK	100
Kabupaten yang melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah	Persentase Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin	83
Tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berisin	Teregistrasinya tenaga kesehatan	65
Kabupaten dan Provinsi menyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan	100 % Kab memiliki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin	100

G. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	70
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	86,2
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K ₄)	%	78,3
Persentase RS yang terakreditasi	%	60
Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	%	75
Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	%	52
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN ₁)	%	90
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	90
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	87,6

Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	87,6
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	100
Persentase RT ber –PHBS	%	80
Persentase Desa Siaga Aktif	%	70
Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan	%	35
Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk	per 1000	1,5
Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	%	75
Persentase desa UCI meningkat	%	100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	80
Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	%	100
Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin	%	100
Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	%	100
Persentase kabupaten dengan daerah bermasalah Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK	%	100
Persentase Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin	%	100
Teregistrasinya tenaga kesehatan	%	70
100 % Kab memiliki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin	%	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2015

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2015

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran dan sasaran program yang telah ditetapkan. Uraian akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 berikut ini :

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 untuk mendukung 10 sasaran strategik. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2015 terdapat 21 indikator kinerja, yang belum tercapai 7 indikator dan yang telah tercapai 14 indikator kinerja. Capaian untuk masing- masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

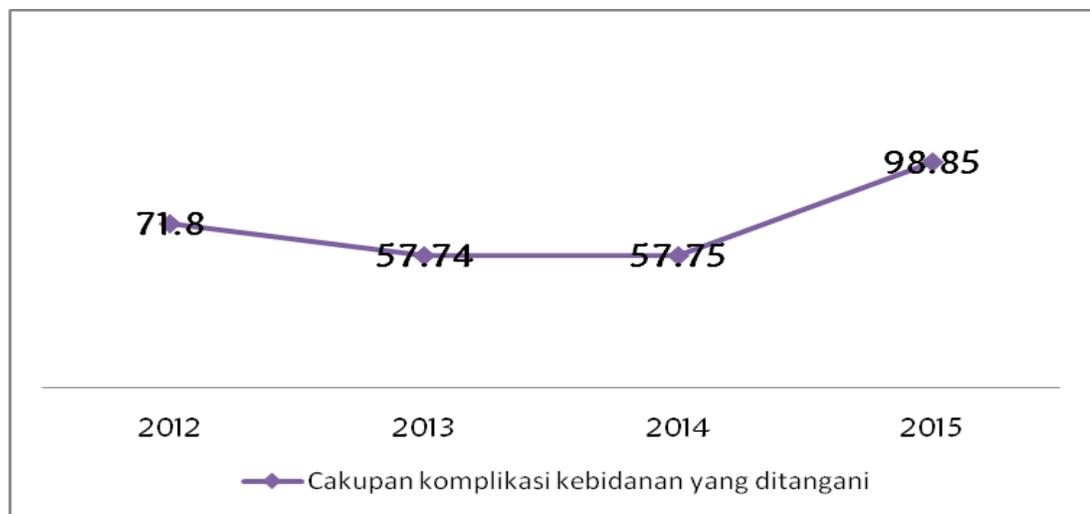
Tabel 3.2
Capaian Indikator kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Sasaran Strategis : Menurunnya Angka Kematian ibu dan bayi				
	1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	67	66,23	98,85
	2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	86,2	80,11	92,93
	3. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4)	%	78,3	76,09	97,17

	4. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	%	90	88,15	97,94
	5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	90	42,63	98,66
2	Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan				
	1. Persentase RS yang terakreditasi	%	60	50	83,33
	2. Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	%	75	56.25	75
	3. Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	%	48	23	47,91
3	Sasaran strategis 3 : Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016				
	1. Persentase Balita ditimbang berat badannya	%	83,76	58	69,36
	2. Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	100	100	100
4	Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Perilaku Hidup bersih dan sehat				
	1. Persentase RT ber-PHBS	%	75	56	75
	2. Persentase Desa Siaga Aktif	%	68	50	76
5	Sasaran Strategis 5 : Menurunnya Angka Penyakit Menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya				
	1. Angka penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk	Per 1000	1,5	<1	0.22

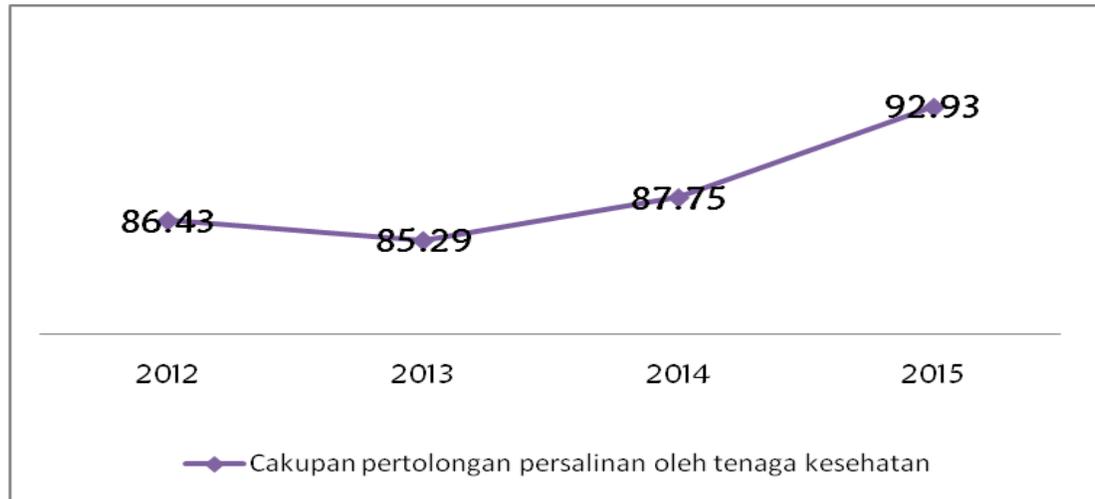
	2. Persentase Kasus TB Baru (BTA +) yang ditemukan	%	75	34	45
	3. Persentase Desa UCI	%	100	77,2	77,2
	4. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	75	49,85	66,46
6	Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standard dan terjangkau oleh masyarakat				
	1. Persentase ketersediaan Obat dan vaksin	%	100	84,27	84,27
7	Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas Manajemen dan Perencanaan Bidang Kesehatan				
	1. Dokumen Perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	%	100	100	100
	2. Persentase Kab yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah	%	83	100	100
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya kesehatan				
	1. Teregistrasinya SDM kesehatan	%	60	5668	50,99
9	Tersusunnya data dan informasi Kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu				
	1. Persentase Kab dan prov memiliki Profil Kesehatan menurut jenis Kelamin	%	100	100	100

1. Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kematian Ibu dan bayi dengan 5 (lima) indikator dan 4 (empat) indikator belum mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja 1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Persentase ibu hamil dengan komplikasi ditangani sebesar 98,85% dengan target 67%. Capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai hasil maksimal yang diharapkan.



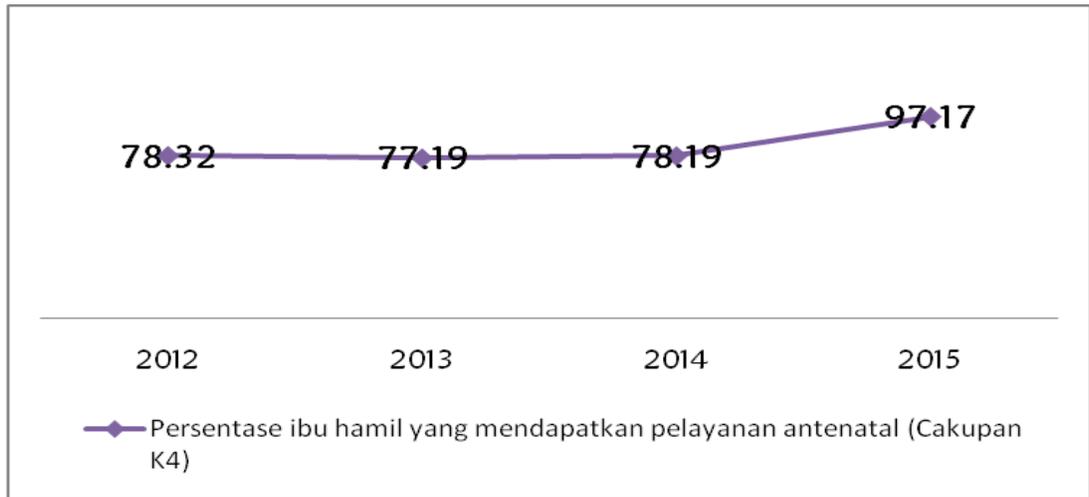
Kegiatan yang dilakukan Oleh Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam peningkatan cakupan Komplikasi kebidanan pada tahun 2015 adalah Peningkatan kemampuan petugas dalam asuhan persalinan normal, Pemeriksaan berkala bagi ibu hamil dan wanita usia subur, Pemeriksaan ibu hamil dan wanita subur, Peningkatan kemampuan petugas dalam penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal.

- b. Indikator Kinerja 2 : Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
 Pada tahun 2015 Jumlah sasaran ibu hamil di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 17.004 ibu hamil dan 15.804 ibu bersalin.



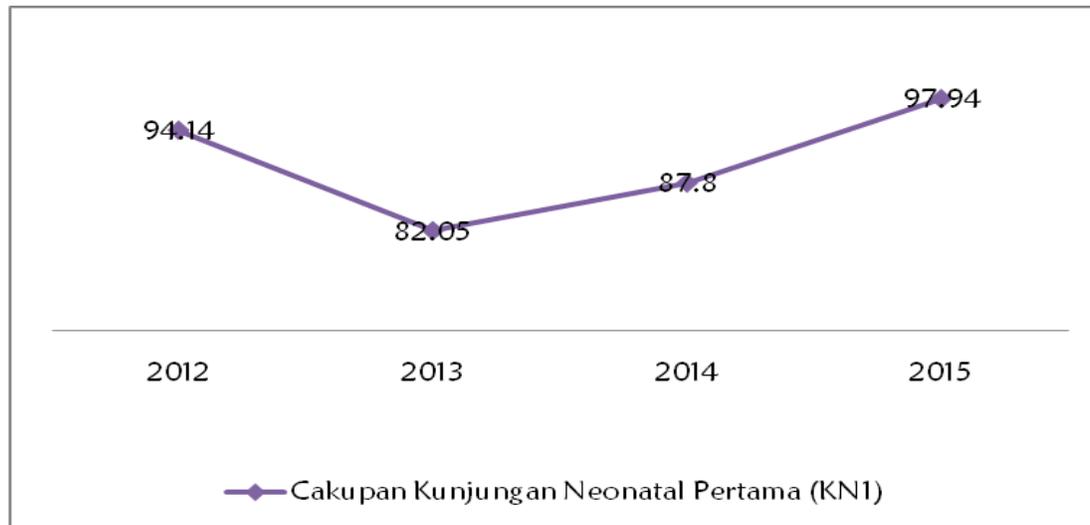
Capaian Kinerja telah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 92,93%. Salah satu hal yang mendorong tercapainya kinerja ini adalah karena ibu hamil telah menyadari pentingnya melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan semakin dekatnya tenaga kesehatan yang ditempatkan di desa sebagai bidan desa yang mendorong ibu hamil untuk memeriksakan dan bersalin di pelayanan Kesehatan oleh bidan yang ditempatkan di desa. Pada akhir tahun 2015 sebanyak 519 bidan desa ditempatkan di desa – desa di wilayah Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Upaya ini menjadi salah satu pendongkrak utama meningkatnya cakupan persalinan di tenaga kesehatan.

- c. Indikator kinerja 3 :Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal
Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal pada tahun 2015 sebesar 97,17% mencapai target yaitu 78,3%



Pada tahun 2014 realisasi K₄ 78,19% dan meningkat pada tahun 2015 yaitu 97,17%. Dalam mendukung peningkatan Hal ini dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan kehamilannya dan membaiknya kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil di fasilitas kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dalam mendukung peningkatan cakupan K₄ adalah Sosialisasi penggunaan Buku KIA dan Buku Seri Kesehatan Anak bagi kader, Pemeriksaan berkala bagi ibu hamil dan wanita usia subur, Workshop peningkatan kesehatan reproduksi, Pemeriksaan ibu hamil dan wanita subur.

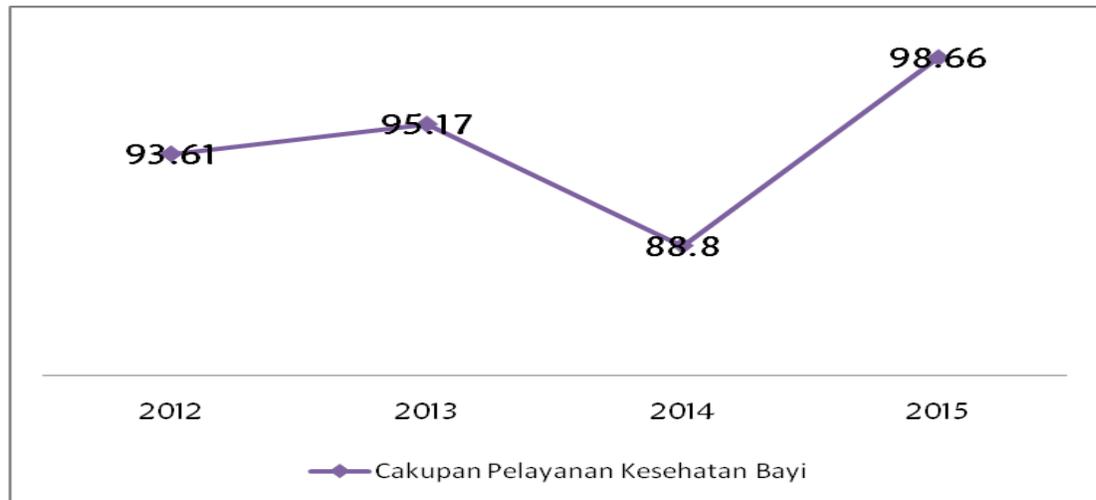
d. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)



Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar, kunjungan ke-1 pada 6 – 24 jam setelah lahir. Pelayanan kesehatan neonatal dasar meliputi ASI eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian Vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, Pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan pada saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali pada 6-24 jam setelah lahir dan dilakukan di fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah. Pada tahun 2013 capaian program KN1 sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan namun belum mencapai target, namun pada tahun 2015 capaian Program KN1 telah mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 97,94 dengan target 90%.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 dalam peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) melalui Sosialisasi rujukan dan tumbuh kembang balita, Peningkatan kemampuan petugas dalam SDIDTK dan Peningkatan kemampuan petugas dalam kelas Ibu Balita

e. Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi



Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Bayi adalah Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Target pada tahun 2015 cakupan pelayanan kesehatan bayi 90% dan persentase realisasite telah mencapai target 98,66.

2. Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan

a. Persentase RS yang terakreditasi

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit terakreditasi adalah rumah sakit dengan standar pelayanan yang telah mendapatkan pengakuan oleh lembaga khusus yang menangani masalah rumah sakit.

NO	KABUPATEN	RUMAH SAKIT	PEMILIK	KET
1	Majene	RSUD Majene	Pemda Kabupaten	
2	Polewali Mandar	RSUD Polewali Mandar	Pemda Kabupaten	
3	Mamasa	RSUD Kondosapata Mamasa	Pemda Kabupaten	
		RS Banua Mamasa	Gereja	
4	Mamuju	RS Regional	Pemda Provinsi	
		RSUD Mamuju	Pemda Kabupaten	
		RS Mitra Manakarra	Swasta	
5	Mamuju Utara	RSUD Mamuju Utara	Pemda Kabupaten	

Persentase Rumah sakit yang terakreditasi 83,33% pada tahun 2015 telah mencapai target 60%. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong Rumah Sakit memiliki Akreditasi. Kegiatan tersebut Antara lain Bimbingan dan survey akreditasi RS, Visitasi penetapan dan peningkatan kelas rumah sakit.

- b. Persentase Rumah sakit provinsi / Kabupaten yang melaksanakan SPM rumah sakit Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Rumah sakit yang telah melaksanakan SPM rumah sakit sebesar 75%. Hal ini telah mencapai target pada tahun 2015 yaitu 75%. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam mendorong Rumah Sakit melaksanakan SPM rumah sakit dengan melakukan peningkatan kapasitas tenaga Rumah Sakit melalui Pelatihan Petugas Laboratorium di Rumah Sakit yang ada di provinsi Sulawesi Barat.

- c. Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED

Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar, Sebagai tempat rujukan atau rujukan antara kasus kegawat darurat obstetri & neonatal dari Polindes dan Puskesmas Memiliki tenaga kesehatan / tim PONED yang terdiri dari Dokter, Bidan, Perawat terlatih.

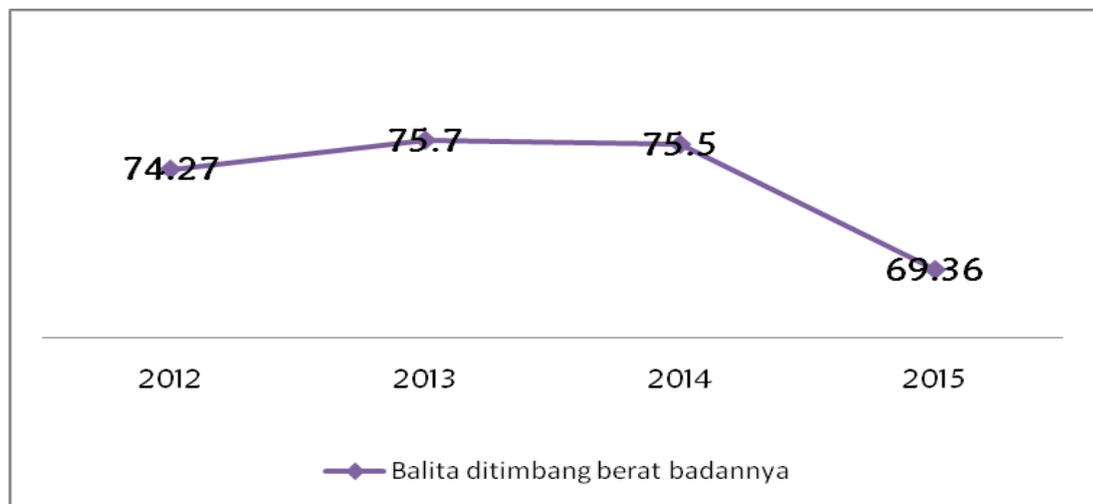
Target Puskemas Rawat Inap mampu Poned pada tahun 2015 sebesar 48% dengan capaian realisasi 47,91%. Dimana persentase ini mencapai target 2015 (48%). Untuk menjaga keutuhan Tim Poned yang telah dilatih ditingkat provinsi perlu adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten agar tahun depan target dapat di capai.

3. Sasaran strategis 3 : Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016:

a. Persentase balita ditimbang berat badannya

Balita adalah anak dengan usia dibawah 5 tahun dengan karakteristik pertumbuhan yakni pertumbuhan cepat pada usia 0-1 tahun dimana umur 5 bulan BB naik 2x BB lahir dan 3x BB lahir pada umur 1 tahun dan menjadi 4x pada umur 2 tahun. Pertumbuhan mulai lambat pada masa pra sekolah kenaikan BB kurang lebih 2 kg/ tahun, kemudian pertumbuhan konstan mulai berakhir.

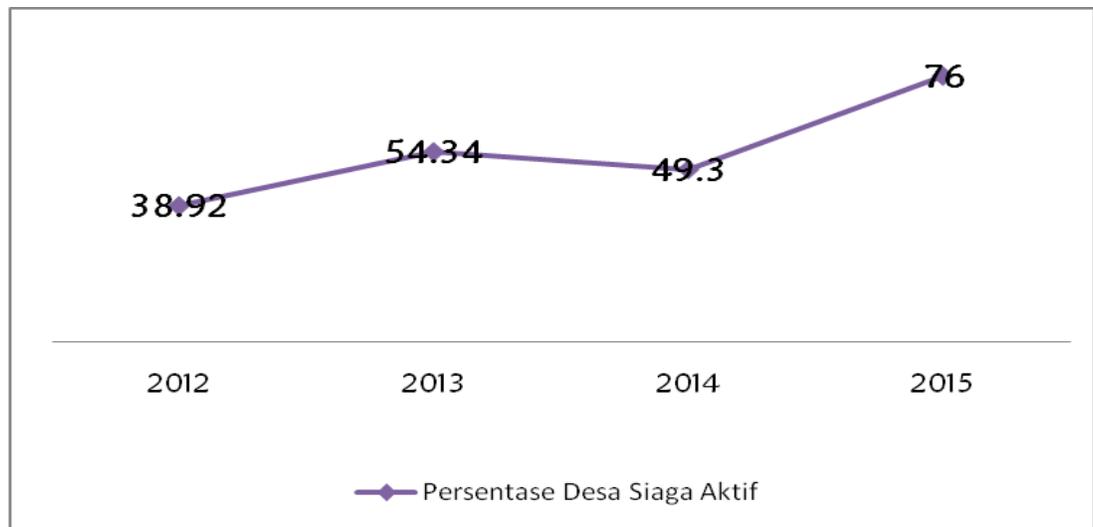
Pada tahun 2015 capaian Realisasi penimbangan bagi balita mencapai angka 69,36% dari target 83,76%. realisasi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2014 hanya 75,5%.



b. Indikator Kinerja Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan adalah Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Setiap tahun semua balita gizi buruk yang ditemukan ditangani. Capaian tahun 2015 sebesar 100%.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Antara lain Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, Monitoring dan Evaluasi Program Gizi, Workshop Percepatan Perbaikan Gizi, Pelatihan PMBA, Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pemetaan Masalah Gizi di Daerah Bangun Mandar, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Air Susu Ibu, Pertemuan Komitmen Peningkatan IMD dan ASI Eksklusif, TOT Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi, Pelatihan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi, Pelayanan Gizi dan KIA bagi Ibu Hamil KEK di Kab. Mamuju Utara.

4. Sasaran 4 : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 1 indikator yang tidak mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Persentase Desa Siaga Aktif



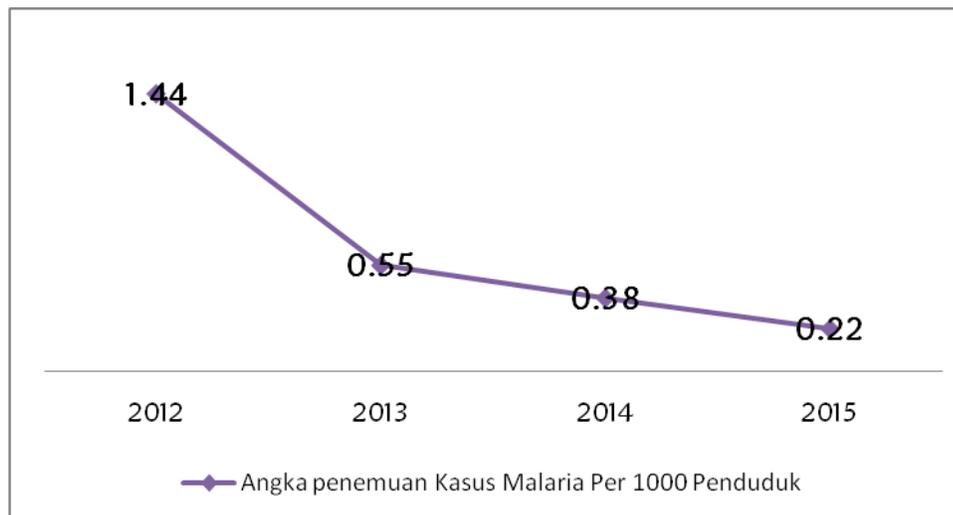
Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit,

lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pada tahun 2015 target Desa Siaga Aktif yang akan dibentuk sebesar 68% dan realisasi sebesar 76%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 49,3%

Kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2015 dalam peningkatan cakupan desa siaga aktif diantaranya adalah Pertemuan koordinasi Pokjandal Desa Kelurahan Siaga aktif dan Pembinaan Desa Siaga Aktif.

5. Sasaran Strategis 5 :Menurunnya Angka Penyakit Menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya
 - a. Angka kesakitan malaria adalah jumlah kasus baru malaria dengan hasil laboratorium positif malaria di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Angka penemuan kasus malaria yang ditargetkan tahun 2015 sebesar 2 per 1000 penduduk dan capaian sebesar 0,38 / 1000 penduduk.



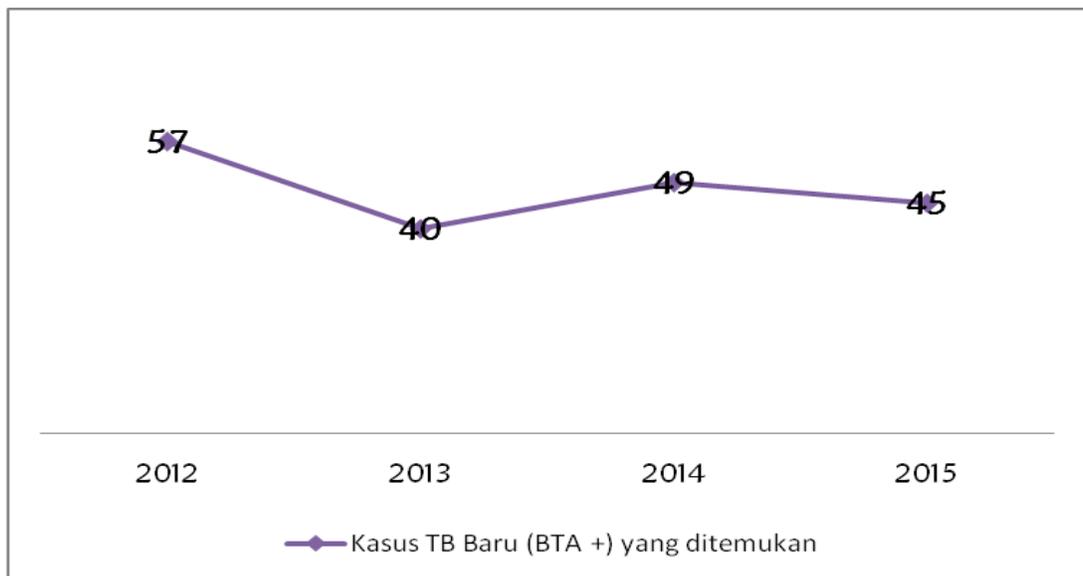
Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 0,22% per 1000 penduduk. Jumlah yang kuran dari 1 angka Kesakitan Malaria

menjadi salah satu indikator keberhasilan Program malaria dalam suksesnya Program Eliminasi Malaria.

Keberhasilan eliminasi malaria sangat terkait peran serta masyarakat melalui Pos Malaria Desa. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat antara lain Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis, Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Pengelola Program Pengendalian Vektor, Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Kader Pemantau dan Pengendali Jentik, Pelacakan Kasus Malaria, dan Pengadaan Abate.

b. Persentase Kasus TB Baru (BTA +) yang ditemukan

Persentase kasus TB paru (BTA+) ditemukan adalah jumlah penemuan kasus yang didapatkan selama tahun 2015. Pada tahun 2015 capaian penemuan kasus BTA+ yang di temukan 45% dari target 75 % yang diharapkan. Capaian pada tahun 2014 sempat meningkat namun pada tahun ini kembali menurun.



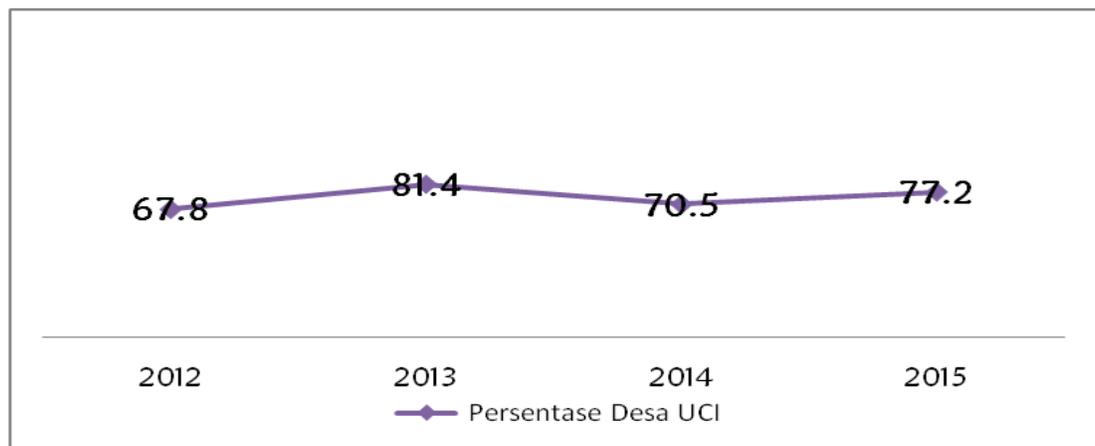
Pada tahun 2015 cakupan yang diharapkan masih sangat jauh dari target 75% yang diharapkan pada tahun yang sama. Hal yang perlu didorong adalah dengan melakukan penguatan terhadap Upaya Program Pemberantasan Penyakit TBC

yang merupakan penyakit menular dan peningkatan penjarangan suspect/tersangka serta Penyuluhan tentang TB perlu ditingkatkan kepada masyarakat.

c. Persentase Desa UCI

Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa atau Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2015 Pelaksanaan Program Imunisasi dalam mendukung UCI di provinsi Sulawesi Barat belum mencapai target UCI yang ditetapkan sebesar 100%

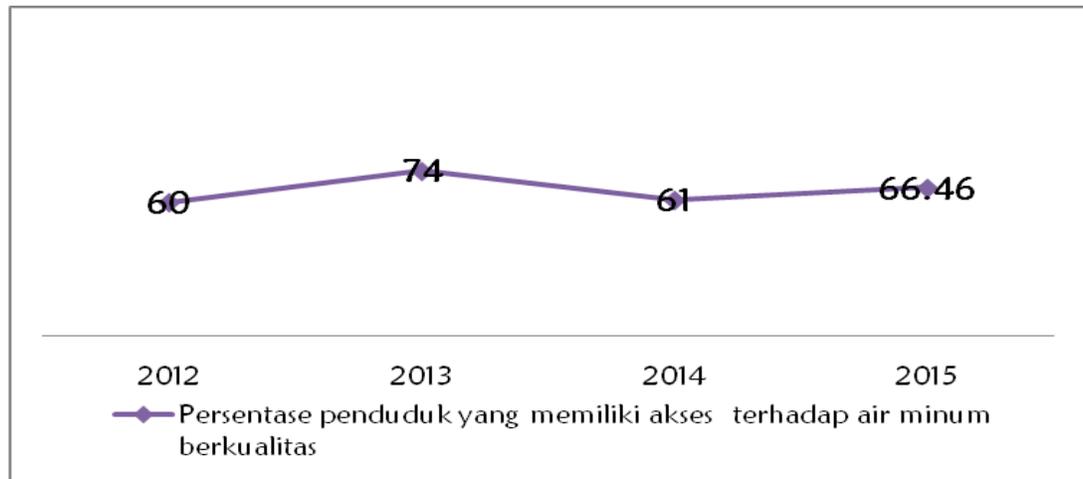


Capaian Desa dengan UCI tahun 2014 pernah mengalami penurunan namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 77,2%. Meskipun mengalami kenaikan namun target belum tercapai sebesar 100% sehingga perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan sweeping program imunisasi oleh petugas kesehatan kepada masyarakat.

d. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

Persentase penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang berkualitas adalah perbandingan antara penduduk atau rumah

tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

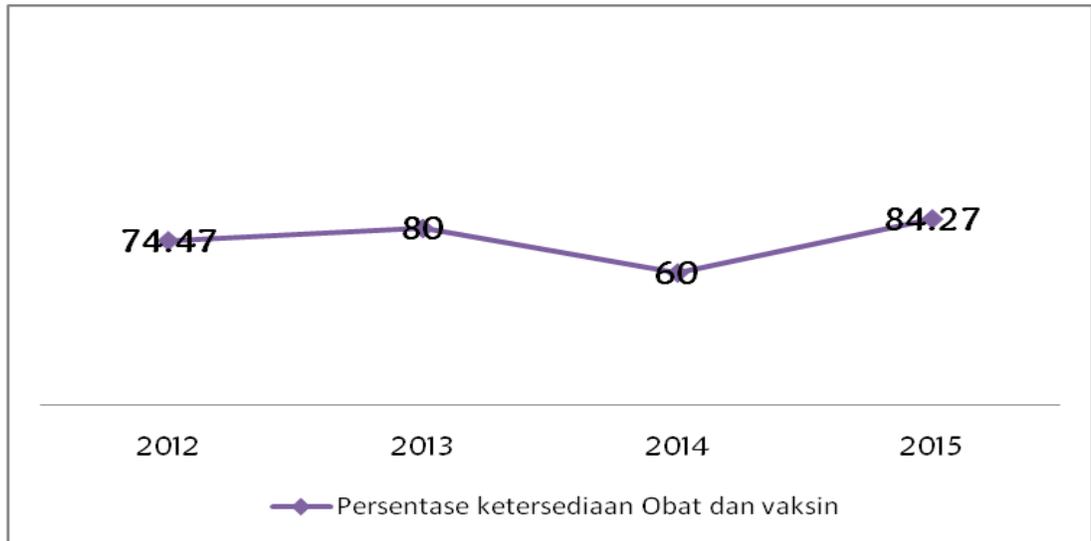


Pada tahun 2015 Capaian Program sebesar 66,46% dan belum mencapai target yang ditentukan 70%. Pada tahun sebelumnya capaian program mengalami penurunan namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Program penyehatan lingkungan pada tahun 2015 adalah pemicuan jamba sehat yang di fokuskan pada daerah yang termasuk dalam intervensi Program Desa BangunMandar yang dilakukan bersama dengan fasilitator Program BangunMandar Provinsi dan kabupaten.

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin adalah tersedianya obat dan vaksin yang tersedia di sarana pelayanan kesehatan. Capaian kinerja ini belum tercapai. Pada tahun 2015 target yang diharapkan akan dicapai 100% dengan realisasi program sebesar 84,27%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 60%.



Dalam peningkatan capaian ini diperlukan kerja keras dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sector khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin.

- Sasaran strategis 7 : Dokumen perencanaan dan anggaran sesuai standar dengan 1 (satu) indikator kinerja meningkatnya manajemen kesehatan yang ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran sesuai standar dan tepat waktu. Pada tahun 2015 ditargetkan 100% dokumen tersusun sesuai standar dan capaian 100%. Dokumen yang tersusun Renstra SKPD, Juknis Satker, RKAL, RKA /DPA SKPD dan RKAP dan DPPA SKPD, LAKIP dan LPPD dan semuanya tersusun tepat waktu sesuai standar.



8. Sasaran strategis 8 : Sasaran tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi dengan indikator kinerja teregistrasinya tenaga kesehatan. Indikator kinerja ini belum tercapai. Pada tahun 2015 target yang akan dicapai 60% dengan capaian yang sudah mendekati target 50,99%. Saat ini tenaga kesehatan yang melakukan registrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 5668. Kewenangan untuk penerbitan STR dilaksanakan oleh MTKI Kementerian Kesehatan RI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Barat hanya mengusulkan nama – nama yang memasukkan berkas.

No. Seri : Ae 98163


MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
 (THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI PERAWAT
REGISTRATION CERTIFICATE OF NURSE

NOMOR REGISTRASI
 REGISTRATION NUMBER : **27 01 5 2 1 15-1029429**

NAMA
 NAME : **Risma Amin**

TEMPAT / TANGGAL LAHIR
 PLACE / DATE OF BIRTH : **LAMPA, 23 Oktober 1991**

JENIS KELAMIN
 SEX : **Perempuan**
Female

NOMOR IJAZAH
 CERTIFICATE NUMBER : **374/2012**

TANGGAL LULUS
 DATE OF GRADUATION : **23 September 2012**

PERGURUAN TINGGI
 UNIVERSITY : **AKPER YPPP WONOMULYO**

KOMPETENSI
 COMPETENCE : **Perawat Ahli Madya**
Nurse Diploma

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : **374/2012**
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI
 VALID UNTIL : **23 Oktober 2020**

Jakarta, 03 September 2015

a.n. Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD

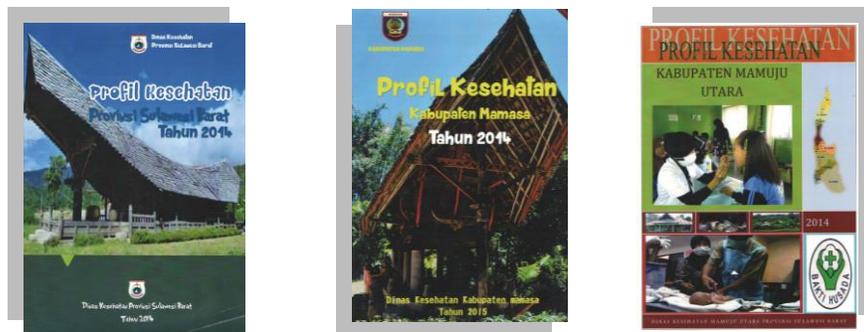

 Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc




0404168

9. Sasaran 9 : Kabupaten dan Provinsi Menyusun profil kesehatan tiap tahunnya dan memiliki Bank Data Kesehatan

Profil Kesehatan adalah dokumen data dan informasi yang disusun setiap tahunnya untuk menggambarkan situasi pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Pada tahun 2015 ditetapkan 6 kabupaten dan 1 provinsi menyusun profil kesehatan dan semuanya terlaksana. Selain itu di kabupaten dan provinsi terpasang jaringan SIKNAS Online yang menjadi Bank Data Kesehatan berbasis teknologi. Kabupaten dan Provinsi yang menyusun profil kesehatan sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Provinsi adalah dengan memfasilitasi kabupaten dalam melakukan pengumpulan data kesehatan ke Puskesmas, Pertemuan pemutakhiran data Kesehatan Provinsi yang dilaksanakan di Mamuju. Selain itu Provinsi memberikan honor bagi pengelola data kesehatan kabupaten masing-masing.



Dari 9 sasaran yang ada dan 21 indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja utama (IKU) tahun 2015 terdapat 7 indikator kinerja yang belum mencapai target

Langkah – Langkah yang dilaksanakan dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk mengatasi kendala :

1. Melakukan pelatihan tenaga Kesehatan untuk pembentukan Tim Poned di Puskesmas
2. Meningkatkan kesadaran ibu-ibu agar balita rutin ditimbang berat badannya
3. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang Penyakit TB
4. Peningkatan sweeping imunisasi
5. Advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses air bersih dan meningkatkan kerja sama dengan aparat desa
6. Mempermantap perencanaan kebutuhan obat di provinsi dan kabupaten
7. Melakukan advokasi penggunaan obat kepada petugas pelayanan kesehatan
8. Melakukan advokasi ke MTKI pusat untuk penerbitan Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Pembiayaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitu pemerintah, swasta (termasuk masyarakat), dan Pembiayaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitu pemerintah, swasta (termasuk masyarakat), dan bantuan luar negeri. Di sektor pemerintah pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 10 Tahun 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berjumlah Rp 50.907.462.135,50,- terdiri dari:

Tabel 3.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)				
1	Belanja tidak langsung	8.109.105.591.00	7.955.336.069.00	98,10
2	Belanja langsung	24.444.272.544.50	17.367.069.561.00	71,05
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)				
1	Dekonsentrasi	18.354.084.000	9.971.420.616	54,33

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target Tahun 2016

Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program	Capaian 2015	Target 2016	Keterangan
Menurunnya Angka Kematian Ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98,85	67	tercapai
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92,93	86,2	tercapai
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K ₄)	97,17	78,3	Tercapai

Menurunnya Angka Kematian Bayi	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	97,94	90	tercapai
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	98,66	90	tercapai
Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan	Persentase RS yang terakreditasi	83,33	60	tercapai
	Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	75	75	tercapai
	Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	47,91	48	Belum Mencapai
Prevalensi Gizi buruk menurun	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	69,36	87,6	Belum Mencapai
	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	100	tercapai
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada tahun 2016	Persentase RT ber – PHBS	75	75	tercapai
70% Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2016	Persentase Desa Siaga Aktif	76	68	tercapai

Menurunnya Angka Penyakit Menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk	0,38	2	tercapai
	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	45	75	Belum Mencapai
	Persentase desa UCI meningkat	77,2	100	Belum Mencapai
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	66,46	75	Belum Mencapai
Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin	84,27	100	Belum Mencapai
Meningkatnya kualitas Manajemen dan Perencanaan Bidang Kesehatan	Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	100	100	tercapai
	Kabupaten yang melaksanakan jaminan kesehatan daerah	83	100	Belum tercapai
Tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berisin	Teregistrasinya tenaga kesehatan	50,99	70	Belum Mencapai

Kabupaten dan Provinsi menyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan	100 % Kab memiliki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin	100	100	tercapai
--	---	-----	-----	----------

Dari tabel di atas terlihat masih ada beberapa realisasi indikator kinerja tahun 2015 yang belum mencapai target bila dibandingkan dengan tahun terakhir Program Lima Tahunan Rencana Strategis yaitu tahun 2016.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa dari 21 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012, ada 7 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu poned belum mencapai dengan capaian kinerja 47,91%, Persentase balita ditimbang berat badannya belum mencapai dengan capaian Kinerja 69,36%, Persentase kasus TB baru (BTA+) yang ditemukan belum mencapai target dengan capaian 45%, Persentase desa UCI belum mencapai target dengan capaian 77,2%, Persentase Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas belum mencapai target dengan capaian kinerja 66,46%, Persentase ketersediaan Obat dan vaksin belum mencapai target dengan capaian kinerja 84,27%, Teregistrasinya SDM Kesehatan belum mencapai target dengan capaian kinerja 50,99%.

Pembiayaan kesehatan dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015 terbagi menjadi 2 bagian yaitu alokasi Belanja Langsung Rp 7.955.336.069,- Belanja Tidak Langsung Rp 17.367.069.561,- dan penyerapan Dana Belanja langsung untuk Tahun 2015 sebesar 9.971.420.616 (54,33%).

Saran:

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun mendatang disarankan untuk melakukan koordinasi dan advokasi kepada pihak terkait untuk peningkatan capaian program di Dinas Kesehatan kabupaten.



Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016